**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUBBAGIAN HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN

KLIPING MEDIA 2025
**PROVINSI BENGKULU**
**SELASA, 26 AGUSTUS 2025**

**SUMBER BERITA:**
Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**
[ ] POSITIF [√] NETRAL [ ] NEGATIF

# Beban Belanja Pegawai Terlalu Besar, Kenaikan TPP ASN Pemprov Ditunda

**BENGKULU** – Beban anggaran belanja pegawai terlalu besar, kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ditunda.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Rusmayadi Hasan, S.STP menyampaikan bahwa beban biaya belanja pegawai Pemprov Bengkulu telah berada di ambang batas yakni sebesar 47 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

"Ini terlalu besar, dan berada jauh di atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan isyarat belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari angka 30 persen, kita sudah lebih di atas itu," jelasnya.

Rusmayadi menyampaikan hal itu memberikan sinyal berbahaya dalam perekrutan tenaga ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Terlebih Gubenur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE memiliki konsen yang jelas pada Bantu Rakyat untuk kesejahteraan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan hingga kesehatan serta pendidikan.

"Dalam Bantu Rakyat itu juga ingin menaikan TPP ASN dan PPPK namun terkendala belanja pegawai kita sudah lebih dari 30 persen," paparnya.

Oleh sebab itu, Rusmayadi menyampaikan peningkatan TPP ASN dilingkungan Pemprov Bengkulu diperidiksi tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, sebab hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang cukup mendalam.

"Sehingga kepada ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu dan PPPK juga harap bersabar, terutama kepada kawan-kawan PPPK Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu," paparnya.

Untuk diketahui saat ini Pemprov Bengkulu telah melakukan pengusulan pengakatan tenaga Non ASN menjadi PPPK Paruh Waktu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4.471 orang.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Dehasen (UNIVED) Provinsi Bengkulu, Dr. Anzori Tawakal menyampaikan, tentunya jumlah ASN yang sangat mempengaruhi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun dengan beban biaya yang cukup besar tentunya memiliki pengaruh terhadap sektor lainnya.

"Seperti peningkatan infrastruktur dan lainnya ini berpengaruh, sebab pemerintah memiliki batasan anggaran yang harus di managemen dengan baik," paparnya.

Untuk hal ini, ia mengukapkan agar dilakukan strategi birokrasi yang baik sehingga berbagai program dan pelayanan dapat berjalan seirama dan dirasakan masyarakat secara langsung. (**rno**)